

MODUL
TEMA **14**

Menjalin Persahabatan Dunia

SEJARAH INDONESIA PAKET C SETARA SMA/MA

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus

LIVEWORKSHEETS

MATERI

A. Makna Bersahabat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bersahabat berasal dari kata dasar sahabat yang berarti kawan atau teman, sedangkan bersahabat memiliki arti :
1. berkawan; berteman; atau
2. menyenangkan dalam pergaulan; ramah.

Perwujudannya adalah Ketika ada sahabat yang sedang sulit atau sakit tentunya kita akan bersimpati dan berempati untuk membantunya.

Politik luar negeri adalah arah kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungannya dengan negara lain. Politik luar negeri merupakan bagian dari kebijakan nasional yang diabdikan bagi kepentingan nasional dalam lingkup dunia internasional.
Bebas artinya bebas memilih atau menentukan negara lain sebagai negara sahabat, sedangkan aktif artinya giat, dinamis, dan bereaksi ketika menghadapi suatu kondisi tertentu. Secara politik
bebas artinya tidak terikat oleh suatu ideologi, tidak masuk blok negara asing tertentu sedangkan aktif artinya ikut mengambil prakarsa dalam mengembangkan persahabatan dan kerja sama internasional. Bebas aktif ini terbukti bahwa Indonesia selalu aktif ikut terlibat dalam penyelesaian masalah regional maupun internasional dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia.

B. Landasan Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif

Mohammad Hatta Sukarno sebagai tokoh proklamator. bagaimana gagasan dan peran beliau dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia? Konsep kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif pertama kali disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Drs. Mohammad Hatta. Konsep dan prinsip politik luar negeri bebas aktif dikemukakan oleh Mohammad Hatta dalam pidatonya yang berjudul Mendayung di antara dua Karangpada tanggal 2 September 1948 dalam sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP).
Politik luar negeri adalah strategi yang ditetapkan suatu negara sebagai pedoman dalam hubungan antarnegara dikancah internasional. Agar eksistensi bangsa dan negara tetap terjaga maka perlu menetapkan landasan yang kuat untuk menopang kebijakannya.
Seperti halnya negara lain, Indonesia sebagai negara yang berdaulat tentu mempunyai landasan politik luar negerinya. Landasan kebijakan politik luar negeri Indonesia ada tiga, yaitu landasan idiil, konstitusional, dan operasional politik luar negeri Republik Indonesia.
Adapun landasan operasional politik luar negeri Indonesia pada masa Reformasi (dari pemerintahan B.J. Habibie sampai dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono) ditetapkan melalui Ketetapan MPR No.IV/MPR/1999 tanggal 19 Oktober 1999 tentang Garis *Gambar 14.1.2 Ir Soekarno dan John F. Kennedy* Besar Haluan Negara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional periode tahun 1999-2004 GBHN menekankan pada faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya krisis ekonomi dan krisis nasional pada tahun 1997,yang dapat mengancam integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di antaranya adalah ketidakseimbangan dalam kehidupan sosial,politik dan ekonomi yang demokratis dan berkeadian. Oleh karena itu, GBHN juga menekankan perlunya upaya reformasi di semua bidang.
Landasan operasional politik luar negeri masa pemerintahan Presiden Megawati masih mengacu pada TAP MPR No.IV/MPR/1999dengan tetap menyandarkan diri pada politik luar negeri bebasaktif sesuai amanat Pembukaan UUD 1945. Adapun fokusnya adalah menekankan kepada sentralitas ASEAN sebagai pilar utama politik luar negeri Indonesia. Bentuk nyata kebijakan tersebut adalah meningkatkan kerjasama dalam segala bidang, dengan negara yang berbatasan langsung dan kerjasama kawasan ASEAN untuk memelihara stabilitas pembangunan dan kesejahteraan. Namun ada catatan buruk dalam kebijakan politik luar negeri masa Presiden Megawati, yaitu kekalahan Indonesai dalam kasus sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan.
Dilanjutkan dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Kabinet Indonesia Bersatu yang meletakkan landasan operasional politik luar negeri dalam tiga program utama yaitu pemantapan

LIVEWORKSHEETS

politik luar negeri dan optimalisasi diplomasi, peningkatan kerjasama internasional terutama dengan ASEAN, serta komitmen perdamaian dunia untuk mengembangkan multilateralisme internasional. Secara garis besar kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan SBY, antara lain terbentuknya kemitraan-kemitraan strategis dengan negara-negara lain; kemampuan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan politik domestik dan internasional; menjalin hubungan dengan siapa saja yang bersedia membantu Indonesia dan menguntungkan pihak Indonesia; dan menerapkan konsep TRUST, yaitu membangun kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia.

C. Tujuan Politik Luar Negeri

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa suatu bangsa dan negara mutlak perlu menjalin hubungan dengan bangsa atau negara lain. Usaha diplomasi merupakan strategi utama dalam menjalin persahabatan dan kerja sama dengan negara lain. Indonesia sebagai negara yang baru merdeka tentunya sangat memerlukan pengakuan dari negara lain. Hal ini didasarkan pada hukum internasional bahwa salah satu kriteria berdirinya suatu negara merdeka adalah adanya pengakuan dari negara lain.
Mengapa politik luar negeri Indonesia bebas aktif? Tentunya karena penentuan suatu kebijakan politik perlu mempertimbangkan banyak hal. Termasuk politik luar negeri Indonesia bebas aktif yang berlandaskan pada amanah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Sebagai negara yang baru merdeka maka kebijakan politik luar negeri juga mempertimbangkan konstelasi politik internasional saat itu.Berdasarkan situasi dan kondisi maka tujuan politik luar negeri Indonesia yang utama adalah mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keselamatan bangsa dan negara.Selain itu, politik luar negeri juga ditujukan untuk menjalin hubungan dengan negara lain dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat dan tentunya ikut mewujudkan perdamaian regional dan internasional dalam kerangka persaudaraan antarbangsa.

D. Dinamika Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif dari Masa ke Masa

1. Lahirnya Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif
Seperti halnya negara lain yang baru merdeka, pada awalnya Indonesia belum merumuskankebijakan politik luar negeri seperti yang kita kenal sekarang. Kebijakan pemerintah Indonesia masih berkonsentrasi untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara dari ancaman kembalinya kekuasaan Belanda di Indonesia.
Khusus pada kebijakan politik luar negeri pemerintah Indonesia masihberkonsentrasi pada upaya memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Tindak lanjut dari kebijakan ini adalah pemerintah mengusahakan serangkaian diplomasi ke beberapa negara. Untuk mempertahankan kedaulatan sebagai negara merdeka, selain dengan perjuangan bersenjata juga melakukan perundingan perdamaian untuk penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda. Upaya perundingan dengan melibatkan bantuan dari negara ketiga sebagai bentuk mediasi dan juga menggunakan jalur Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).Keberhasilan Indonesia mendapatkan pengakuan dunia internasional melalui meja perundingan ini menjadi titik tolak dari perjuangan diplomasi Indonesia mencapai kepentingannya.

2. Politik Luar Negeri Indonesia Masa Demokrasi Liberal 1950-1959

Ciri khas pemerintahan Demokrasi Liberal ditandai dengan sistem pemerintahan kabinet perlementer sehingga sering disebut sebagai Demokrasi Parlementer, dimana kekuasaan pemerintahan dipegang oleh perdana menteri sebagai kepala pemerintahan beserta kabinetnya, sedangkan presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara.Perdana menteri bersama dengan para menteri atau kabinetnya, bertanggung jawab kepada parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kondisi inilah yang menjadikan program kerja pemerintah tidak dapat segera dituntaskan karena sering terjadinya pergantian kabinet.

3. Politik Luar Negeri Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin

Masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin didasarkan pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Tap MPRS Nomor VIII/MPRS/1965. Politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin bersifat revolusioner. Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, pada masa ini seluruh kekuasaan pemerintahan berada di tangan

presiden. Presiden Soekarno mempromosikan konsep politik Nasakom (nasionalis, agama dan komunis) yang diterapkan baik di dalam negeri maupun dalam hubungan internasional. Melalui konsep Nasakom ini Presiden Soekarno menganggap kekuatan politik dunia akan didominasi Blok Barat dalam bentuk Nekolim (Neo Kolonialisme dan Imperialisme) yang akan menjalankan praktik kolonialisme dan imperialisme baru.
Dari sini dapat dilihat adanya pergeseran arah politik luar negeri Indonesia yang lebih condong ke Blok Timur (komunis), baik secara domestik maupun internasional. Di tingkat internasional, kebijakan politik luar negeri saat itu lebih diintensifkan dengan kelompok negara komunis, dan dikenal dengan istilah pembentukan Poros Jakarta-Peking-Pyongyang. Kebijakan politik luar negeri seperti ini tentunya menjadi bentuk penyimpangan terhadap prinsip bebasaktif dalam politik luar negeri Indonesia.
Bentuk penyimpangan politik luar negeri lainnya adalah melakukan Konfrontasi dengan Malaysia dan Indonesia keluar dari keanggotaan PBB.

4. Politik Luar Negeri Indonesia pada masa Orde Baru

Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, kebijakan pemerintah Orde Baru lebih memprioritaskan pada pembangunan ekonomi. Dengan alasan pembangunan ekonomi tidak dapat dilaksanakan secara baiktanpa adanya stabilitas politik keamanan atau sebaliknya terjaminnya politik keamanan maka pembangunan bidang lain dapat terlaksana.Salah satu perhatian dalam kebijakan politik luar negeri pemerintah Orde Baru adalah meningkatkan hubungan antarnegara melalui forum Association South East Asian Nation (ASEAN) untuk menjamin stabilitas keamanan kawasan regional.Selain itu, kebijakan politik luar negeri pemerintah Orde Baru (New Order)berusaha meningkatkan hubungan dengan negara-negara Blok Barat khususnya Amerika Serikat. Tujuan utamanya adalah mendapat kepercayaan dan sekaligus memobilisasi sumber dana internasional untuk kepentingan rehabilitasi ekonomi dalam negeri.

5. Politik Luar Negeri Indonesia Era Reformasi

Kebijakan politik luar negeri Indonesia di awal reformasi sebagai masa transisi pemerintahan masih sangat dipengaruhi oleh kondisi domestik akibat krisis multidimensi. Isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), sistem demokrasi, konflik separatisme, KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dan aspek lain menjadi hambatan tersendiri bagi pemerintahan transisi. Mengingat kondisi seperti ini, perhatian utama politik luar negeri Indonesia diarahkan pada upaya pemulihan kembali kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia serta memulihkan perekonomian nasional.
Masa awal reformasi yang dimulai oleh pemerintahan Presiden B.J Habibie yang disibukkan dengan usaha memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional yang sempat terpuruk sebagai dampak krisis ekonomi di akhir era Orde Baru.
Presiden Habibie berhasil menarik simpati dari Dana Moneter Internasional/International Monetary Funds (IMF) dan Bank Dunia untuk mencairkan program bantuan untuk mengatasi krisis ekonomi. Kasus lepasnya Timor-Timur mewarnai perjalanan sejarah Indonesia khususnya masa pemerintahan B.J. Habibie, namun demikian pada masa ini pulapeletakan dasar demokrasi di Indonesia.
Pengganti Habibie adalah Abdurrahman Wahid yang terpilih menjadi Presiden Indonesia yang keempat pada tahun 1999. Kondisi politik diwarnai adanya transisi demokrasi menyebabkan ketidakstabilan politik, diperparah perekonomian masih belum bangkit dari krisis dan timbulnya konfl ik horizontal dan vertikal semakin bermunculan dan mengancam keamanan nasional. Hal-hal itulah yang mengurangi kepercayaan internasional terhadap Indonesia.
Presiden Abdurrahman Wahid kemudian diganti oleh Megawati yang sebelumnya menjabat wakil presiden. Megawati mewarisi kondisi domestik Indonesia yang kacau dan kondisi hubungan luar negeri Indonesia yang minim kepercayaan internasional.
Megawati dalam memimpin banyak mengambil kebijakan yang berorientasi kanan yang ditandai dengan dijadikannya Amerika Serikat sebagai negara non-Asia pertama yang dikunjungi Megawati. Selanjutnya, Megawati banyak melakukan kunjungan luar negeri sebagai bentuk kelanjutan usaha-usaha pendahulunya untuk mencari dukungan dan kerjasama luar negeri.Seperti halnya pada masa Habibie dengan keluarnya Timor Timur dari wilayah Indonesia, pada masa pemerintahan Megawati juga terjadi kekalahan dan kegagalan diplomasi terkait sengketa pulau Sipadan dan Ligitan dengan Malaysia yang berakibat terhadap lepasnya kedua pulau dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

LIVEWORKSHEETS

A. Konferensi Asia Afrika (KAA)

Perkembangan politik pasca Perang Dunia II diwarnai munculnya persaingan antara dua kelompok kekuatan dunia,yaitu Blok Barat (Amerika Serikat) dan Blok Timur (Uni Soviet/Rusia). Kehadiran badan perdamaian dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sepertinya menjadi tidak berarti karena kenyataannya dua negara pimpinan masing-masing blok tersebut memiliki pengaruh dan kekuasaan yang dominan, termasuk dalam pengambilan keputusan PBB. Di sisi lain, masih banyak masalah di beberapa belahan dunia terkait dengan praktik penjajahan suatu bangsa atas bangsa lainnya terutama di Kawasan Asia, Afrika, Amerika Selatan (Latin), dan kawasan lainnya.
Gedung Dana Pensiun dan Gedung Concordia dipersiapkan sebagai tempat sidang-sidang konferensi. Persiapan konferensi semakin matang mulai dari akomodasi dan transportasi buat peserta, panitia, wartawan, dan lain-lain. Persiapan konferensi bahkan diperiksa oleh Presiden Soekarno pada 7 April 1955 dengan meresmikan penggantian nama gedung yang akan menjadi tempat konferensi, yaitu Gedung Concordia menjadi Gedung Merdeka, Gedung Dana Pensiun menjadi Gedung Dwiwarna, dan Jalan Raya Timur menjadi Jalan Asia Afrika.

Dasasila Bandung

1. Menghormati hak-hak asasi manusia dan menghormati tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB.
2. Menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua negara.
3. Mengakui persamaan derajat semua ras serta persamaan derajat semua negara besar dan kecil.
4. Tidak campur tangan di dalam urusan dalam negeri negara lain.
5. Menghormati hak setiap negara untuk mempertahankan dirinya sendiri atau secara kolektif, sesuai dengan Piagam PBB.
6. a. Tidak menggunakan pengaturan-pengaturan pertahanan kolektif untuk kepentingan khusus negara besar mana pun.
   b. Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain mana pun.
7. Tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi atau menggunakan kekuatan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara mana pun.
8. Menyelesaikan semua perselisihan internasional dengan cara-cara damai, seperti melalui perundingan, konsiliasi, arbitrasi, atau penyelesaian hukum, ataupun cara-cara damai lainnya yang menjadi pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB.
9. Meningkatkan kepentingan dan kerja sama bersama.
10. Menjunjung tinggi keadilan dan kewajiban-kewajiban internasional.

B. Gerakan Non-Blok (GNB)

Salah satu latar belakang munculnya Gerakan Non Blok adalah akibat persaingan antara Blok Barat (Amerika Serikat dengan sekutunya) dan Blok Timur (Uni Soviet/Rusia dengan sekutunya). Persaingan kedua blok tersebut bahkan sempat memicu terjadinya beberapa konfl ik terutama di Asia, seperti Perang Korea, dan Perang Vietnam. Ketegangan dunia semakin meningkat akibat persaingan antara Blok Barat dan Blok Timur yang mencapai puncaknya pada krisis Teluk Babi di Kuba, yang hampir saja memicu Perang Dunia III.
Bagaimanakah peran Indonesia dalam lahirnya Gerakan Non Blok?
Terbentuknya Gerakan Non Blok tidak terlepas dari proses penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. Bermula dari pertemuan lima pemimpin negara India, Burma (Myanmar), Ceylon (Srilanka), Indonesia, dan Pakistan dalam rangka persiapan KAA.Pada pertemuan tersebut, Jawaharlal Nehru menyampaikan gagasan yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan hubungan kerja sama antarnegara.

C. Misi Pemeliharaan

Perdamaian Garuda

Selain berperan dalam pembentukan organisasi kerja sama maupun dalam bentuk suatu gerakan bersama seperti GNB, Indonesia juga selalu proaktif dalam mewujudkan perdamaian dunia. Kali ini akan kita bahas upaya Indonesia dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia melalui pengiriman misi pemeliharaan perdamaian Garuda atau Misi Garuda. Sejak pertama kali diadakannya pengiriman pasukan pemeliharaanperdamaian, Indonesia sudah beberapa kali ikut mengirimkan pasukannya. Dalam pengiriman

misi pemeliharaan perdamaian ini, pasukan Garuda dari Indonesia akan bergabung dengan pasukan dari negara lain, sehingga muncul istilah Kontingen Garuda (KONGA).

D. Pembentukan *Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara* (ASEAN)

Upaya Indonesia untuk meningkatkan hubungan kerja sama antarnegara tetangga semakin intensif dengan adanya kesepakatan Bersama untuk membentuk organisasi kerja sama negara-negara di Asia Tenggara.
Keinginan Indonesia mendapat sambutan dari sesama negara di kawasan Asia Tenggara lainnya. Keinginan ini didorong situasi dan kondisipolitik dunia pada era 1960-an sedang terjadi perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar yang dapat menyulut konfl ik antarnegara di kawasan Asia Tenggara. Salah satu motivasi pembentukan organisasi kerja sama di kawasan Asia Tenggara ini adalah untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang aman dan damai.
Upaya pembentukan organisasi kerja sama tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan antarmenteri luar negeri dari lima negara, yakni Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), S Rajaratman (Singapura), Narsisco Ramos (Filipina) dan Thanat Khoman (Thailand) pada tanggal 5-8 Agustus di Bangkok.

Isi Deklarasi Bangkok

- Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara
- Meningkatkan perdamaian dan kestabilan regional
- Meningkatkan kerja sama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi
- Memelihara kerja sama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada
- Meningkatkan kerja sama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara.

Berdasarkan Deklarasi Bangkok, tujuan didirikannya ASEAN tidak semata-mata karena faktor politikdalam arti untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas di kawasan regional dan mengadakan dialog untuk membahas perbedaan yang terjadi di antara anggotanya. Namun tujuannya lebih luas lagi yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya. Pembentukan ASEAN dilandasi beberapa prinsip kerja sama, antara lain:

- Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN;
- Komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan ASEAN;
- Menolak agresi, ancaman, penggunaan kekuatan, atau tindakan lainnya dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan hukum internasional;
- Mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota ASEAN, dan menghormati kebebasan yang mendasar, pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia, serta pemajuan keadilan sosial.

E. Deklarasi Juanda

Tahukah Anda Hari Nusantara? Melalui Keputusan Presiden Nomor 126 Tahun 2001 tentang Hari Nusantara, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara dan diperingati sebagai Hari Nasional. Peringatan Hari Nusantara ini merupakan penegasan dan pengingatan kembali bahwa Indonesia adalah Negara Kepulauan terbesar di dunia. Hari Nusantara merupakan perwujudan dari Deklarasi Djuanda yang dianggap sebagai Deklarasi Kemerdekaan Indonesia kedua. Deklarasi Djuanda menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah yang utuh dan berdaulatdalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sebelum Deklarasi Djuanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie* 1939 (TZMKO 1939). Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut.

LIVEWORKSHEETS

Kedaulatan wilayah laut Negara Indonesia mulai digagas pada masa pemerintahan Perdana Menteri (PM) Ali Sastroamidjojo, melalui pembentukan Panitia Inter-Departemental untuk menyusun Rancangan Undang-Undang(RUU) tentang Wilayah Perairan Indonesia dan Lingkungan Maritim pada tahun 1956. Gagasan ini kemudian dimatangkan pada masa pemerintahan Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja dengan mengeluarkan Pengumuman Pemerintah mengenai Perairan Negara Republik Indonesia pada tanggal 13 Desember 1957, yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Djuanda. Pengumuman ini menyatakan bahwa:

1) Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai corak tersendiri;
2) sejak dahulu kepulauan Nusantara sudah merupakan satu kesatuan; 3) ketentuan ordonansi 1939 dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Deklarasi Djuanda tersebut selanjutnya diresmikan menjadi Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia.

F. Organisasi Konferensi Islam (OKI)

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa situasi kondisi politik internasional pasca Perang Dunia II diwarnai ketegangan bahkan di beberapa kawasan seperti Terusan Suez terjadi konflik bersenjata. Ketegangan politik di Timur Tengah bertambah panas akibat terjadinya pembakaran Masjid Al Aqsa pada 21 Agustus 1969 oleh pengikut fanatik Kristen dan Yahudi di Yerusalem.

Deklarasi Rabat menegaskan perlu dibentuk organisasi kerja sama atas dasar agama Islam, penghormatan pada Piagam PBB dan hak asasi manusia.Deklarasi Rabat juga menjadi awal pembentukan Organisasi Konferensi Islam (OKI) atau *Organisation of Islamic Cooperation.* Tindak lanjut Deklarasi Rabat, pada 1970 para menteri luar negeri negaranegara Islam berkumpul di Jeddah membahas sikap dan tindakan politik negara Islam serta menetapkan Jeddah sebagai markas OKI. Secara umum tujuan OKI diarahkan untuk memperkuat ikatan persaudaraan sesama negara-negara Islam yang dilandasi hak suatu bangsa untuk berdaulat. Secara garis besar tujuan OKI, antara lain:

- Meningkatkan kerja sama dan solidaritas antar negara anggota OKI;
- Menghapus perbedaan rasial, diskriminasi, dan kolonialisme;
- Mengupayakan perlindungan bagi tempat-tempat suci Islam; dan
- Mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan hak pembentukan negara merdeka dan berdaulat.

G. Jakarta Informal Meeting

Peran penting Indonesia berikutnya ditunjukkan pada saat terjadinya konfl ik dan perebutan kekuasaan di Kamboja. Konfl ik Kamboja juga melibatkan negara tetangga terdekatnya, Vietnam bahkan sampai melibatkan beberapa negara adidaya Amerika Serikat, Uni Soviet (Rusia), dan Cina.

Konfl ik diawali pada tanggal 18 Maret 1970, saat Letnan Jenderal Lon Nol, Perdana Menteri Kamboja bersama Pangeran Sisowath Sirik Matak melakukan kudeta terhadap kekuasaan Sihanouk. Sihanouk kemudian memilih untuk mengasingkan diri di Beijing dan memutuskan untuk beraliansi dengan Khmer Merah, yang bertujuan untuk menentang pemerintahan Lon Nol. Khmer merah di bawah pimpinan Pol Pot berhasil menggulingkan kekuasaan Lon Nol pada 17 April 1975 dan sekaligus mengubah bentuk negara dari kerajaan menjadi sebuah Republik Demokratik Kamboja (*Democratic Kampuchea*).

kedua ini, Australia turut ikut serta dengan diwakili oleh Menteri Luar Negeri, Gareth Evans, yang mengusulkan rancangan *Cambodia Peace Plan* yang berisi: mendorong upaya gencatan senjata, menurunkan pasukan penjaga perdamaian PBB di wilayah yang konflik, dan mendorong pembentukan pemerintah persatuan nasional untuk menjaga kedaulatan Kamboja sampai pemilihan umum diadakan.*Jakarta Informal Meeting III* dilaksanakan pada bulan Februari 1990. Pertemuan ketiga ini membahas mengenai pengaturan pembagian kekuasaan di antara pihak Pemerintah Koalisi Demokratik Kamboja dengan Republik Rakyat Kamboja dengan membentuk *Supreme National Council* (SNC) sebagai badan tertinggi di Kamboja. Kesepakatan lain sebagai hasil dari pertemuan ini, antara lain penarikan seluruh kekuatan asing dari Kamboja, akan diselenggarakan pemilu di bawah pengawasan PBB, pengawasan pelaksanaan HAM, dan pemulangan pengungsi Kamboja.

EVALUASI

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan cara mengetik huruf a, b, c, d, atau e untuk jawaban yang tepat dan benar pada kolom yang telah disediakan !

1. Setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda sehingga menjadi salah satu kepentingan dalam politik luar negeri. Pernyataan ini menunjukkan dorongan utama suatu negara menjalin hubungan kerja sama dengan negara lain adalah untuk....
   a. menegakkan perdamaian dunia
   b. membina persahabatan antarnegara
   c. menunjukkan negaranya memiliki kelebihan
   d. memenuhi kebutuhan domestik
   e. menghadapi ancaman negara adikuasa

2. Kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif berawal dari Konsepsi Wakil Presiden Republik Indonesia, Drs. Mohammad Hatta dalam pidatonya yang berjudul…
   a. Mendayung di antara Dua Karang
   b. Indonesia Menggugat
   c. Politik Indonesia Bebas Aktif
   d. Indonesia dalam Konstelasi Global
   e. Politik Luar Negeri Indonesia

3. Landasan Ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah….
   a. Pancasila
   b. UUD 1945
   c. Undang-Undang
   d. Peratuaran Pemerintah
   e. Peraturan Presiden

4. Landasan Konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah….
   a. Pancasila
   b. UUD 1945
   c. Undang-Undang
   d. Peratuaran Pemerintah
   e. Peraturan Presiden

5. Latar belakang kebijakan politik luar negeri Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia didasarkan karena Inggris mendukung pembentukan negara baru yaitu....
   a. negara Singapura
   b. negara Federasi Malaysia
   c. negara Borneo Utara
   d. negara Sabah
   e. negara Brunei Darussalam

6. Bentuk kerja sama yang dilakukan dua negara disebut kerja sama....
   a. nasional
   b. bilateral
   c. regional
   d. global
   e. internasional

7. Kebijakan politik luar negeri Indonesia pada awal masa pemerintahan Orde Baru lebih difokuskan untuk….
   a. kemajuan negara Indonesia
   b. hubungan dengan luar negeri
   c. memobilisasi sumber dana
   d. kerjasama militer
   e. keamanan regional ASEAN

8. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 UUD 1945 maka perjanjian dengan negara lain merupakan kekuasaan dari….
   a. DPR sebagai lembaga legislatif
   b. Presiden dengan persetujuan MPR
   c. Presiden dengan persetujuan DPR
   d. DPR dengan persetujuan MPR
   e. Menteri Luar Negeri sebagai pembantu presiden

9. Sejak awal berdirinya organisasi ini lebih memfokuskan kerjasama bidang social ekonomi dan budaya. Hal ini merupakan tujuan pembentukan...
   a. OPEC
   b. ASEAN
   c. Gerakan Non Blok
   d. Organisasi Konferensi Islam
   e. SEATO

10. Syarat utama yang harus diwujudkan oleh suatu negara untuk dapat menempatkan perwakilan diplomatiknya di luar negeri adalah….
    a. menjadi anggota PBB
    b. bersedia mendukung program-program PBB
    c. mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya
    d. mampu melaksanakan politik luar negerinya secara konsisten
    e. adanya pengakuan kedaulatan baik secara *de facto* maupun secara *de jure*

LIVEWORKSHEETS